

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul, H., & Syam, K. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi. Jakarta : Salemba Empat.
- Adam, A. K., Toddy, A., & Dini, A. R. (2021). Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Belanja Langsung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 115–124. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.29294>
- Baldric, S. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Chabib, S., & Heru, R. (2010). Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Bandung : Fokusmedia.
- Dr. Rachmat, M. S. (2010). Akuntansi Pemerintahan (Cetakan I). Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Elmizar, & Kasmadi. (2020). Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Riset Manajemen Indonesia*, 2(3), 149–157.
- Febrian, B., & Putriana, V. T. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai dalam Konteks Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus di Kota Solok-Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 86–95. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1230>
- Haryono, & Abridinata Jering, O. (2020). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Kabupaten Landak. *Jaakfe*, 10(2).

- Lailatur, R., & Dian, F. (2022). Analisis Penerapan Asas Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1).
- Manullang, Y. M. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan BRIZZI Bank Rakyat Indonesia di Kota Pekanbaru.
- Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021. Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri
- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai. 17 April 2017. Jakarta